



**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TEHADAP PERSEKONGKOLAN
DALAM TENDER PADA PUTUSAN KPPU
NOMOR 10/KPPU-I/2017**

TESIS

ICHSAN SAPUTRO

2010622009

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

2022



**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TEHADAP PERSEKONGKOLAN
DALAM TENDER PADA PUTUSAN KPPU
NOMOR 10/KPPU-I/2017**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

ICHSAN SAPUTRO

2010622009

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ICHSAN SAPUTRO

NIM : 2010622009

Tanggal : 13 Juli 2022

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 13 Juli 2022

Yang Menyatakan,



(ICHSAN SAPUTRO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ICHSAN SAPUTRO

NIM : 2010622009

Program Studi : Magister hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TEHADAP PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PADA PUTUSAN KPPU NOMOR 10/KPPU-I/2017

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Juli 2022

Yang menyatakan,



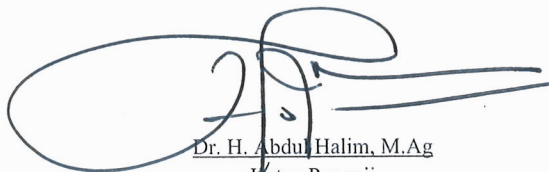
(ICHSAN SAPUTRO)

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis di ajukan oleh :

Nama : ICHSAN SAPUTRO
NIM : 2010622009
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TEHADAP
PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PADA PUTUSAN
KPPU NOMOR 10/KPPU-I/2017


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



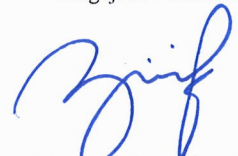
Dr. H. Abdul Halim, M.Ag
Ketua Penguji



Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H.
Penguji II/ Pembimbing



Dr. Suherman, S.H., L.L.M.
Penguji I



Dr. Benihamoni Harefa, SH, LLM
Kaprosdi



Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : Rabu, 13 Juli 2022

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TEHADAP PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PADA PUTUSAN KPPU NOMOR 10/KPPU-I/2017

Ichsan Saputro

Program studi Magister Hukum pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Saputroid25@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu bentuk pelanggaran dalam persaingan usaha yang dapat menghambat aktivitas perekonomian dan merugikan orang lain adalah perbuatan persekongkolan. Perbuatan persekongkolan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persaingan usaha tidak sehat sendiri adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat pada persekongkolan tender disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kesempatan pasar dengan jumlah pelaku usaha. Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Sehingga pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tersebut mendapat keuntungan tersendiri dan pelaku usaha lain dirugikan atas perbuatan dari persekongkolan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis adanya persekongkolan dalam tender dan kepastian hukum pada proyek pembangunan stadion mandala krida dalam putusan perkara nomor 10/KPPU-I/2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang menggunakan berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan serta menggunakan analisis hukum yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dapat mengetahui kepastian hukum serta bagaimana persekongkolan tender itu dapat dilakukan pada proyek pembangunan stadion Mandala krida dalam putusan perkara nomor 10/KPPU-I/2017. Saran dalam penelitian ini diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana pembuktian yang dilakukan oleh KPPU dilakukan terhadap tindakan persekongkolan dalam tender dengan pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal*. Selain itu pendekatan ini, memungkinkan adanya kepastian usaha, efisiensi dalam proses litigasi dan sebagai alat untuk mencegah dampak dari persaingan, artinya bahwa pendekatan ini hemat biaya dalam proses litigasi, biaya administrasi dan sumber yuridis lainnya. Sedangkan kepada KPPU agar dalam menentukan nilai denda baiknya terlebih dahulu menjabarkan faktor-faktor yang dijadikan dasar perhitungan denda serta merincikan proses perhitungan denda, sesuai dengan amanat undang-undang.

Kata Kunci : Persaingan Usaha Tidak Sehat, Persekongkolan Tender

ANALYSIS OF LEGAL CERTAINTY AGAINST COLLABORATION IN TENDERS ON THE KPPU'S DECISION NUMBER 10/KPPU-I/2017

Ichsan Saputro

Master of Law study program at the Jakarta Veterans National Development University

Saputroid25@gmail.com

ABSTRACT

One form of violation in business competition that can hinder economic activity and harm others is conspiracy. This conspiracy is regulated in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Unfair business competition itself is competition between business actors in carrying out production and or marketing activities of goods and or services that is carried out dishonestly or against the law or hinders business competition. Unfair business competition in tender conspiracy is caused by an imbalance between market opportunities and the number of business actors. Conspiracy is a form of cooperation carried out by business actors with other business actors with the intention of controlling the relevant market for the interests of the conspiring business actors. So that the business actor who commits the conspiracy gets its own advantage and other business actors are harmed by the actions of the conspiracy. The purpose of this study was to analyze the existence of conspiracy in the tender and legal certainty in the construction project of the Mandala Krida stadium in the case decision number 10/KPPU-I/2017. The type of research used is normative juridical law research, which uses various primary, secondary, and tertiary legal sources, through statutory approaches and case approaches, with library research data collection techniques and uses qualitative juridical analysis. The results of this study are able to find out legal certainty and how the tender conspiracy can be carried out on the Mandala Krida stadium construction project in case decision number 10/KPPU-I/2017. Suggestions in this research are needed to amend Law No. 5/1999 where the KPPU's evidence is carried out against conspiracy in tenders using the *rule of reason* and *per se illegal*. In addition, this approach allows for business certainty, efficiency in the litigation process and as a tool to prevent the impact of competition, meaning that this approach is cost-effective in the litigation process, administrative costs and other juridical sources. Meanwhile, for the KPPU to determine the value of the fine, it is better to first describe the factors that are used as the basis for calculating the fine and detail the process of calculating the fine, in accordance with the mandate of the law.

Keywords: Unfair Business Competition, Tender Conspiracy

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Rasul – Nya, yang telah melimpahkan karunia – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PADA PUTUSAN KPPU NOMOR 10/KPPU-I/2017”**. Maksud dan tujuan dari penulisan Tesis ini semata – mata untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Perdata Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Keberhasilan ini tentu tidak datang dengan sendirinya melainkan melalui kerja keras dan usaha penulis, doa dari Orang Tua Penulis, petunjuk dan bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis serta bantuan dari pihak lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Erna Hernawati. Ak. CPMA. CA., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Bapak H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
6. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., L.L.M., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
7. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;;
8. Bapak Satino, S.Sos., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

9. Bapak Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah membantu, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memotivasi penulis dalam proses belajar dalam penyusunan Tesis ini;
10. Bapak Dr. Suherman, S.H., L.L.M., selaku Dosen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan selaku Dosen Penguji Tesis yang telah membantu, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memotivasi penulis dalam proses belajar dalam penyusunan Tesis ini;
11. Ibu Dr. Atik Winanti, S.H., M.H., selaku Dosen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah membantu, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memotivasi penulis dalam proses belajar dalam penyusunan Tesis ini;
12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan ini saya meminta maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu akan tetapi tanpa mengurangi rasa hormat dan bakti saya karena telah yang telah memberikan ilmu, mengajari, serta mendidik Penulis selama menempuh perkuliahan Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
13. Seluruh Staf Sekretariat Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yaitu Mbak Yuli, Mas Kiki, Mas Dwi, dan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa terimakasih saya yang telah membantu proses administrasi selama Penulis menempuh pendidikan Magister Hukum;
14. Kedua Orang Tuaku tersayang, Bapak Tubino dan Ibu Sri Lestari, *My Very Best Motivator*, yang telah merawat dan mendidik serta memberikan kasih sayangnnya kepada penulis dari kecil hingga dewasa;
15. Keluarga besar Simbah Atmo Pawiro Samin (Bantul) dan keluarga besar Simbah Ngatini (Sleman) Jogjakarta yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan Magister Hukum;
16. Teman – teman Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (PK- Perdata Bisnis) Alda, Pak Bachtiar

Marbun, Bayu, Dimas, Fahmi, Fanny, Isye, Pak Jo, Langgeng, Shabika, Vikram dan Zidni;

17. Seluruh Mahasiswa/I Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta khususnya Angkatan 2020 yang sangat banyak jika saya sebutkan satu persatu dan tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya ucapkan Terima kasih atas dukungan, semangat, motivasi dan sarannya.

Dengan segenap kemampuan yang ada, Penulis mencoba menyajikan Tesis ini dengan baik. Namun, Penulis menyadari Tesis ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima saran dan kritikan. Akhir kata Penulis berharap semoga dengan Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat.

Jakarta, Juli 2022

Ichsan Saputro

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN.	iv
ABSTRAK.	v
ABSTRACT.	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	5
1.5.1 Kerangka Teori.....	5
1.5.2 Kerangka Konseptual	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER	
PENGADAAN BARANG DAN JASA	12
2.1 Perkembangan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	12
2.1.1 Latar Belakang dibentuknya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	12
2.1.2 Asas dan Tujuan	15
2.2 Konsep Persekongkolan Tender Dalam Hukum Persaingan Usaha.....	16
2.2.1 Pengertian Umum Tentang Persekongkolan	16
2.2.2 Pengertian Umum Tentang Persekongkolan Tender.....	20
2.2.3 Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999	22
2.2.4 Modus Persekongkolan Tender	27
2.3 Konsep umum pengadaan Barang dan Jasa	30
2.3.1 Pengertian Konsep umum pengadaan Barang dan Jasa	30
2.3.2 Pengaturan dan Kebijakan Pengadaan Jasa.....	33
2.3.3 Prinsip-prinsip umum Konsep umum pengadaan barang dan jasa.....	37
2.4 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	40
2.4.1 Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	40
2.4.2 Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	42
2.4.3 Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	43
2.4.5 Pihak-pihak yang Terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1 Metode Penelitian.....	53
3.2 Pendekatan Penelitian.....	54
3.3 Sumber dan Jenis Data	54

3.4	Metode Pengumpulan Data	55
3.5	Metode Analisis Data	55
BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TEHADAP PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PADA PUTUSAN KPPU NOMOR 10/KPPU-I/2017 57		
4.1	Kepastian Hukum Terkait Dengan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Stadion Mandala Krida Dalam Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2017	57
4.1.1	Kronologi Kasus dalam Dalam Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2017	57
4.1.2	Putusan Majelis Komisi dalam Perkara Nomor 10/KPPU-I/2017	63
4.1.3	nalisis Kepastian Hukum Terkait Dengan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Stadion Mandala Krida Dalam Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2017.....	66
4.2	Persekongkolan Dalam Tender Yang Dilakukan Oleh Terlapor Dalam Perkara Nomor 10/KPPU-I/2017.....	73
BAB V PENUTUP		
4.1	Kesimpulan.....	84
4.2	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA..... 86		
RIWAYAT HIDUP		